

ABSTRAKSI
EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN
KELAUTAN DALAM PENGELOLAAN DI PELABUHAN
SYAH BANDAR

ERNA SUPRIANA (99230142)

Seiring diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing maka diberlakukan pula Peraturan Daerah Kota Tegal No.2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Kota Tegal. Dengan demikian dari hasil rapat Paripurna DPRD Kota Tegal ditetapkan dan disahkan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan digabung dengan nama Dinas Pertanian dan Kelautan sebagai perampingan dinas-dinas. Meskipun demikian Dinas Pertanian dan kelautan tetap memiliki peranan dalam pengelolaan Pelabuhan Syah Bandar karena biar bagaimanapun kapal-kapal ikan akan melakukan pendaratan ikannya di pelabuhan. Dengan demikian tak bisa diabaikan pentingnya keefektifan kinerja Dinas Pertanian dan Kelautan dalam pengelolaan pelabuhan yang merupakan sarana kapal-kapal yang mendaratkan ikannya. Dimana dari hasil perikanan dan kelautan merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Kota Tegal setiap tahunnya yang mencapai 1 milyar. Namun dengan penggabungan dinas tersebut maka dirasa tugas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sehingga dengan keadaan yang demikian keberadaan Dinas Pertanian dan Kelautan untuk keterlibatannya dalam pengelolaan pelabuhan sebagai dermaga kapal-kapal ikan dirasa tidak efektif yang tampak dari hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Dinas Pertanian dan Kelautan dalam pengelolaan Pelabuhan Syah Bandar dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam menganalisa data sebelumnya penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, interview, dan dari dokumen yang kemudian disajikan dengan metode deskriptif dengan teknik analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas kinerja Dinas Pertanian dan Kelautan masih rendah, hal ini nampak dimana di dalam Dinas belum mencapai adanya rentang kendali jabatan sehingga sebagai organisasi pemerintah belum nampak sebagai organisasi yang baik dan efektif. Hal ini juga tampak pada hambatan-hambatan yang dijumpai sampai saat sekarang (hingga batas akhir penulis mengadakan penelitian) belum dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun saran penulis yang ingin disampaikan bagi peneliti yang akan datang agar lebih cermat lagi dalam membedakan kebijakan maupun program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan dengan Pemerintah Kota Tegal dan Dinas Pertanian dan Kelautan dengan Dinas Perikanan Propinsi Semarang. Serta seberapa tingkat koordinasi sanagai tolok ukur keberhasilan yang dilakukan

Dinas Pertanian dan Kelautan dengan fungsional lain dalam pendampingan pelaksanaan tugas dan fungsinya.